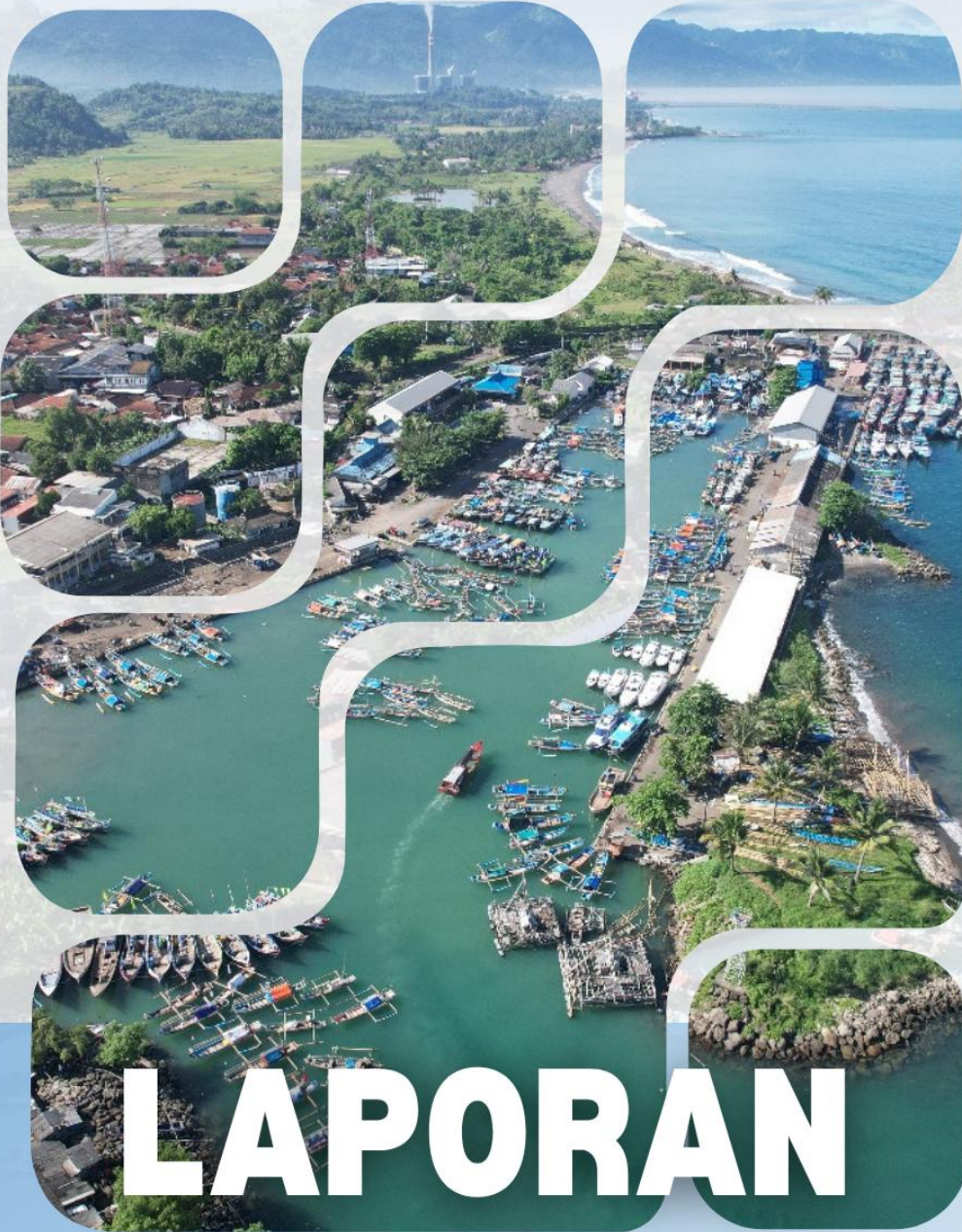


2025



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 3

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PALABUHANRATU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karunia – Nya Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi PPN Palabuhanratu kepada publik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

LKj PPN Palabuhanratu ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang dilaporkan secara bertahap. LKj PPN Palabuhanratu Triwulan III tahun 2025 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja tahun 2025.

Menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, untuk itu kritik dan saran dalam upaya penyempurnaan sangat kami harapkan agar laporan ini bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang telah membantu dan turut serta dalam penyelesaian laporan ini semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua, Aamiin.

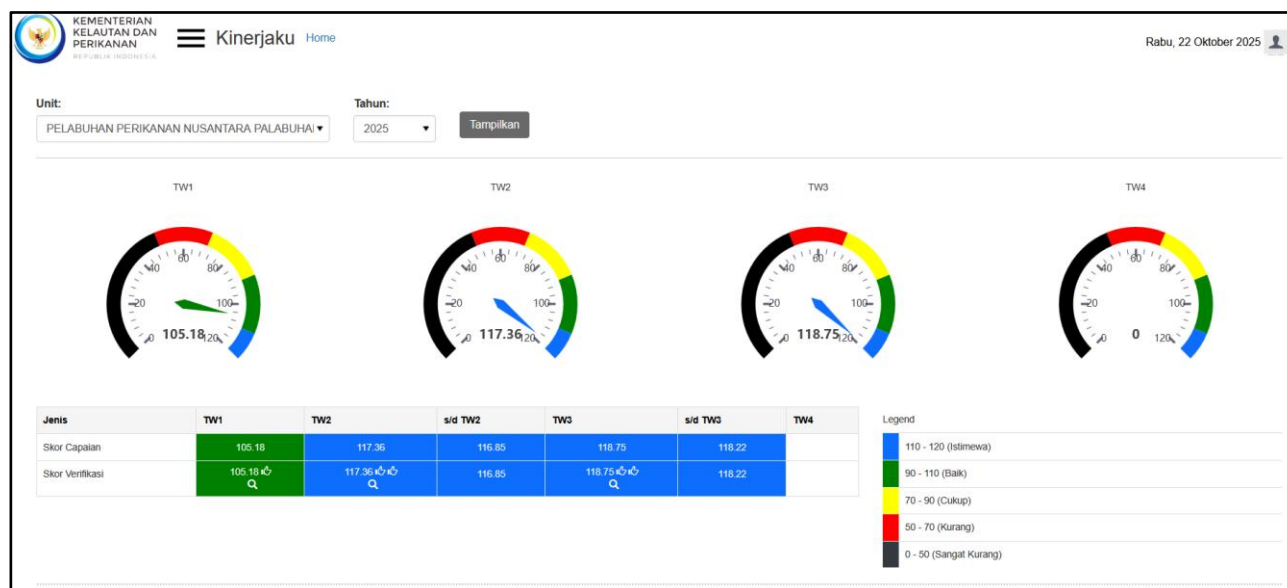
Palabuhanratu, 15 Oktober 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 14.833.174.000,-. Namun setelah adanya efisiensi, dukungan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12.074.613.000,-. Dengan dukungan anggaran tersebut pada triwulan 3 tahun 2025 capaian pelaksanaan anggaran sebesar 10.518.705.432,- atau 83,48%. Secara kinerja, PPN Palabuhanratu mendapat Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 118,75%, sebagaimana terlihat pada dashboard dibawah ini:



Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerjaku PPN Palabuhanratu Triwulan III Tahun 2025

Hal ini didukung oleh pencapaian 11 (sebelas) indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Adapun rincian pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada triwulan 2 adalah sebagai berikut:

1. PNPB Non SDA di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta);

2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton);
3. Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai);
4. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai);
5. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal);
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu (Persen);
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen); dan
8. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Nilai).

Guna meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode selanjutnya. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama pimpinan dan pegawai lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu diharapkan dapat mendukung kinerja yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	1
1.3 Kedudukan.....	2
1.4 Tugas dan Fungsi	3
1.5 Aspek Strategis.....	5
1.6 Sistematik Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis PPN Palabuhanratu 2021 – 2024	8
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.3 Target Kinerja dan Anggaran.....	11
2.4 Rencana Aksi Penetapan Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	17
SS 1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu	20
SS 2 Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat.....	20
SS 3 Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing yang optimal dan bertanggung jawab.....	23
SS 4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Palabuhanratu ...	27
SS 5 Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu	29
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	38
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41
4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya.....	42
4.4 Rekomendasi Tindak Lanjut.....	42
LAMPIRAN DATA DUKUNG KINERJA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2025.....	11
Tabel 2.	Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025	12
Tabel 3.	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	12
Tabel 4.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2025... ..	16
Tabel 5.	Capaian IKU “Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Palabuhanratu” Triwulan III Tahun 2025.....	18
Tabel 6.	Capaian IKU “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu” Triwulan III Tahun 2025.....	21
Tabel 7.	Analisis Rasio Upaya Penangkapan Ikan (<i>Effort</i>) dan Armada serta <i>Catch Per Unit Effort</i> (CPUE).....	21
Tabel 8.	Capaian IKU “Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu” Triwulan III Tahun 2025.....	24
Tabel 9.	Capaian IKU “Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu” Triwulan III Tahun 2025.....	26
Tabel 10.	Capaian IKU “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Triwulan III Tahun 2025.....	28
Tabel 11.	Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu” Triwulan III Tahun 2025.....	30
Tabel 12.	Capaian IKU “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu” Tahun 2025.....	33
Tabel 13.	Capaian Indikator “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu” Triwulan III Tahun 2025	37
Tabel 14.	Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Tahun 2025 .	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerja PPN Palabuhanratu Triwulan III Tahun 2025.....	iii
Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	5
Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2025.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPN Palabuhanratu) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Lima kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan; (2) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; (3) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan; (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan (5) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

1.2 GAMBARAN UMUM

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan kawasan terpilih sebagai basis atau sentra pengelolaan perikanan untuk pengembangan ekonomi usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, pelaku usaha dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan masyarakat, melalui penataan pusat pelayanan bisnis perikanan yang berfungsi melayani, mendorong, dan memacu pembangunan kawasan perikanan di wilayah Jawa Barat.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada di Teluk Palabuhanratu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia (WPP-RI 573). Dilatarbelakangi adanya potensi perikanan di sekitar Palabuhanratu, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu pada tahun 1991 – 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IDB) dan pada tanggal 18 Februari 1993 diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI.

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan) dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan) sebagai mainstream dari pembangunan kelautan dan perikanan mengingat wilayah laut/pantai dimana kegiatan perikanan berada merupakan sumberdaya anugerah potensial (potential endowed resources) yang khas memiliki keterkaitan (interdependency) yang kompleks dengan bidang sosial-perekonomian-budaya masyarakat disekitarnya. Kesiapan komponen infrastruktur/ fasilitas/ sarana penangkapan akan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan eksploitasi sumberdaya tersebut.

1.3 KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan Pelabuhan perikanan antara lain:

- Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

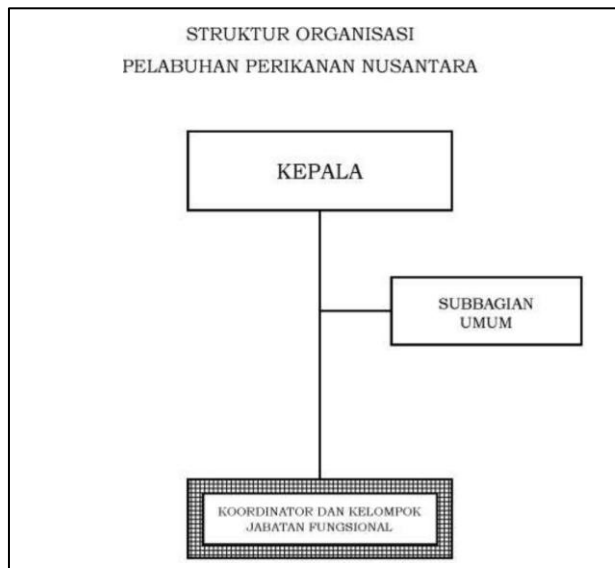
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang Pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;

- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap terdiri dari:

- a. Subbagian Umum. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.5 ASPEK STRATEGIS

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang kompeten, professional, dan berintegritas;

- d. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; dan
- e. Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara efisien dan akuntabel.

1.6 SISTEMATIK PENYAJIAN

Penyusunan LKj 2025 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang transparan dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang LKj yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini menguraikan secara singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/ Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Renja) dan Penetapan Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan pembahasan IKU sesuai dengan Balanced Score Card (BSC). Memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis

akuntabilitas kinerja, yang diuraikan secara sistematis serta membandingkan data kinerja, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan juga akuntabilitas keuangan yang menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/ tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategis pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 2025 – 2029

VISI

Sesuai dengan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat kelautan dan perikanan dalam melaksanakan Pembangunan kelautan dan perikanan melalui tiga tujuan utama Pembangunan (ultimate goals) yaitu: 1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (blue food), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Dalam mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden serta tiga tujuan utama Pembangunan (ultimate goals), Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”.

MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mendukung tujuh dari delapan Asta Cita terutama Misi Asta Cita ke-2,5, dan 8 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang

melaksanakan Asta Cita 7.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/ Lembaga lain yang beraktfitas di dalam Pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/ harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah **“Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja: Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
2. Sasaran kegiatan kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah **“Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat”**, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
3. Sasaran kegiatan ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang optimal dan bertanggung jawab”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;

- b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.
4. Sasaran kegiatan keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja:
- a. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan;
 - b. Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan.
5. Sasaran kegiatan kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah **“Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK);
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - d. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - g. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu;
 - h. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan (NKPA) Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

2.3 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah menetapkan target – target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merujuk pada IKU Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target – target tersebut tertuang pada Perjanjian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2025 sebagai dengan tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Rp. Juta)	1.050,14
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Ton)	6.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	35
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	55
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	195
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,50
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	81

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	92
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	71,50
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	88,50

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 14.833.174.000,-.

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	646.261.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10.052.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.176.861.000
JUMLAH		Rp. 14.833.174.000,-

2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target — target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya — upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi penetapan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
1	Penerimaan PNPB Non SDA di PPN Palabuhanratu	Pelayanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
		Sarana Penunjang Pengusahaan Pelabuhan
		Pelaksanaan Penataan Dokumen Pelayanan Pelabuhan Perikanan
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
		Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu	Sosialisasi Dan Monev Pengguna Jasa Di Pelabuhan Perikanan
		Rapat Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Pelabuhan
4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu	Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
		Publikasi Dan Promosi Pelabuhan Perikanan
		Bimtek Dan Pembinaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Di Pelabuhan
		Operasional Inspeksi Pengendalian Mutu Di Pelabuhan Perikanan
		Pengumpulan dan verifikasi data logbook penangkapan ikan
		Surveillance ISO 9001:2015
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu	Tata Kelola Dan Operasional Kesyahbandaran
		Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kesyahbandaran dalam rangka mendukung pelaksanaan PNBK pasca produksi dan penangkapan ikan terukur
		Pengelolaan Dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Di Pelabuhan Perikanan
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu	Rehabilitasi Gedung Kantor
		Rehabilitasi Geung Arsip
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	Operasional K5 Di Pelabuhan
		Surveillance ISO 14001:2015
		Bulan Cinta Laut
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	Pelaksanaan Pemeriksaan kelaikan/pengukuran/pengujian/inspeksi kapal perikanan
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Awak Kapal Perikanan/Nelayan
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan	Penguatan WBK Lingkup PPN Palabuhanratu
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu	Implementasi PIPK dan SPIP Lingkup PPN Palabuhanratu
12	Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengelolaan Kinerja Lingkup PPN Palabuhanratu

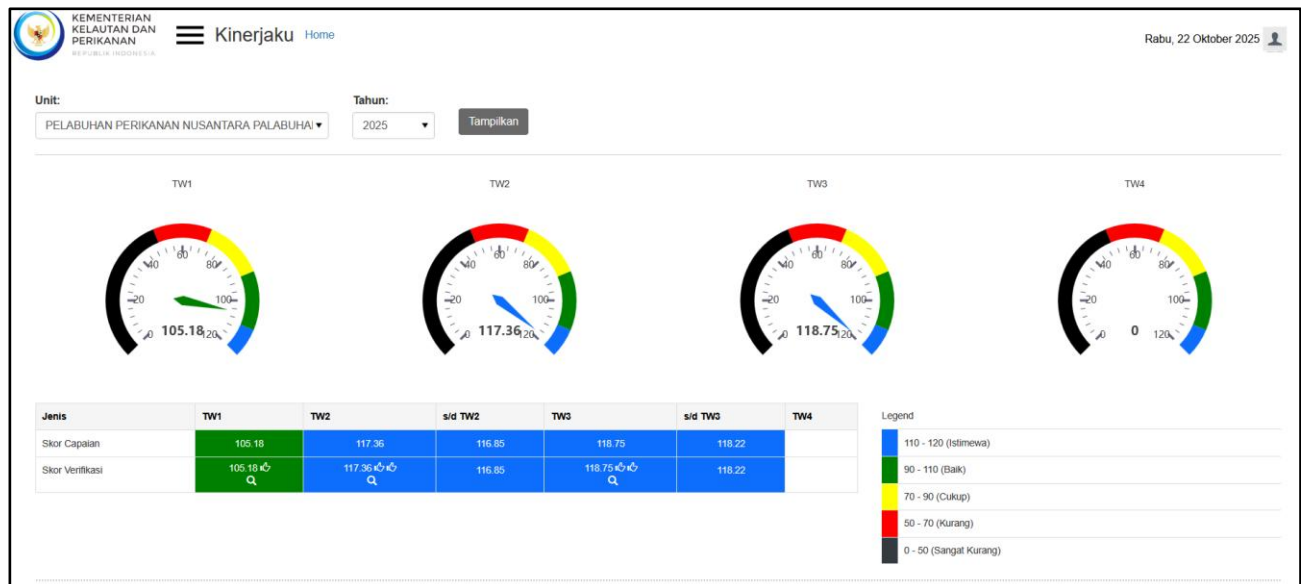
Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
13	IP ASN PPN Palabuhanratu	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dan Penerapan Disiplin Pegawai
		Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		Langganan Daya dan Jasa
		Pelayanan Terkait Operasional Satker
		Langganan Jasa Lainnya
		Pengadaan Sarana Perkantoran
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	Pemeliharaan Kantor
16	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu	Gaji dan Tunjangan
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Palabuhanratu	Penyusunan Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu	Review Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) mendukung pembangunan perikanan melalui 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Metode pengukuran kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Hasil pengukuran kinerja kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2024 seperti pada gambar 3.



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Triwulan III Tahun Anggaran 2025

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu memperoleh rata – rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2025 Triwulan III sebesar 118,75% dan

termasuk dalam kategori “Istimewa” (≥ 110). Adapun rincian pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW III	Capaian TW III	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	1. Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)	1.050,14	797,60	2.104,61	263,87
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	6.000	4.300	5.948,62	138,34
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing	3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu (%)	100			
		4. Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	84	84	98,80	117,62
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu (%)	35			
		6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu (%)	55			
		7. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	30,10	30,10	88,44	293,82
4	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	195	192	248	129,17
		9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26			
5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	10. Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,50			
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu (%)	85	85	100	117,65
		12. Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu (Nilai)	88			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW III	Capaian TW III	%
		13 Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu (Indeks)	87			
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu (%)	76	76	100	131,58
		15 Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu (%)	81			
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu (Nilai)	92			
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	71,50			
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Indeks)	88,50	88.5	95,43	107,83

SS 1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu

Sasaran kegiatan - 1 “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah seluruh penerimaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pungutan PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021 serta Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di

Pelabuhan Perikanan. Adapun Jenis pelayanan jasa yang menghasilkan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meliputi: Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan; Jasa Pas Masuk Kendaraan; Jasa Coldstorage; Jasa Kebersihan; Pengadaan Air; Penggunaan Alat Berat; Jasa Perbengkelan; Jasa Penggunaan Lahan dan Bangunan; Pengadaan Es; Jasa Tempat Penumpukan Barang; Jasa Pemakaian mess; Jasa pemakaian ruang rapat; dan Pelayanan Listrik.

Tabel 5. Capaian IKU “Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu” Triwulan III Tahun 2025

SS 1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu												
IKU 1	Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
231.64	211.07	324.07	-	486.13	1050.14	262.53	232.41	88.53	22.13	-52.19	1050.14	22.13	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
456.42	405.85	718.78	-	920.07		525.07	1,552.92	295.75	147.88	68.75		147.88	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
690.12	620.43	1,167.27	-	1,300.00		787.6	2,104.61	267.22	200.41	61.89		200.41	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
876.43	945.50	1,666.23	1532.69	1,725.00		1050.14		0.00	0.00			0.00	

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.104.609.347,- dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dicanangkan dalam perjanjian kinerja pelabuhan yaitu sebesar Rp. 787.608.750,- atau 267,22%. Capaian realisasi IKU 1 ini mengalami kenaikan sebesar 61,89% dari capaian pada periode yang sama di tahun 2024 namun mengalami penurunan penerimaan dari Triwulan II ke Triwulan III sebesar Rp. 768.521.586,- atau 58,21% dari penerimaan Rp. 1.320.359.351,- menjadi Rp. 551.837.765,-. Penerimaan tertinggi ada pada bulan Juni 2025 sebesar Rp. 966.700.289,-. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan penerimaan pada triwulan III ini adalah:

1. Penerimaan tertinggi adalah dari penerimaan pemanfaatan lahan, gedung dan bangunan sebesar Rp. 913.977.283,- atau 43,48%.

2. Perubahan tarif pemanfaatan sewa lahan dan bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 sesuai surat edaran dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.3521/DJPT.1/HK.410/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang membuat tarif menjadi lebih tinggi;
3. Terdapat 3 (tiga) jenis penerimaan tertinggi sampai dengan Triwulan III (dua) adalah:
 - a) Penerimaan pemanfaatan lahan, gedung dan bangunan sebesar Rp. 913.977.283,- atau 43,48%;
 - b) Penerimaan jasa tambat 5 – 30 GT sebesar Rp. 201.622.463,- atau 9,58%;
 - c) Penerimaan pelayanan jasa listrik sebesar Rp. 170.482.135,- atau 8,10%.

Selain faktor pendukung atau yang mendorong meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Non SDA di PPN Palabuhanratu, terdapat pula beberapa pelayanan yang tidak tercapai sampai target yang ditentukan dan perlu upaya lebih untuk meningkatkan penerimaan pada layanan tersebut yaitu:

- a. Pas Masuk Kendaraan Golongan III Roda 6 / Truck dan kendaraan Golongan IV / Bus : Berkurangnya pengunjung wisatawan yang masuk ke wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan Pas Masuk Berlangganan Roda 4 yang menggunakan kendaraan yang melakukan aktifitas tetap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sangat terbatas dan perusahaan yang melakukan aktifitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu jarang yang mengajukan berlangganan. Maka dari itu diperlukan kegiatan penertiban pada pas masuk yang bertujuan agar penerimaan lebih optimal dan mengurangi losing pas masuk;
- b. Jasa Kebersihan Warung Kios : Belum terbitnya persetujuan dari Kementerian Keuangan dan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sudah mengajukan usulan persetujuan sewa ke Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.635/PPN.PLR/KU.340/V/2025 tanggal 02 Mei 2025. Dengan belum terbitnya persetujuan sewa, maka penerimaan jasa kebersihan kios belum tercapai yang seharusnya pada bulan Juni 2025 penerimaan jasa kebersihan sudah tercapai;
- c. Jasa Pekerjaan Ringan, dikarenakan pada bulan Januari 2025 s/d Maret 2025 belum petugas yang mengerjakan pekerjaan sedang (pekerjaan bubut) karena kebanyakan

konsumen dalam hal ini pengguna kalau ada perbaikan mesin 1 (satu) paket yaitu pekerjaan ringan dan pekerjaan sedang (Pekerjaan ringan seperti pengelasan sedangkan pekerjaan sedang adalah pekerjaan bubut). Petugas yang mengerjakan pekerjaan sedang baru masuk pada bulan Mei 2025;

- d. Jasa Tangki BBM dan Instalasi : Jumlah Kapal Motor yang ukurannya di bawah 10 GT yang melakukan pengisian solar bersubsidi sangat sedikit, dikarenakan kapal yang melakukan penangkapan ikan berkurang yang disebabkan musim ikannya berkurang.

Jika dibandingkan dengan capaian penerimaan PNBP pada satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PNBP PPN Palabuhanratu adalah sebesar 114,91% dengan besar capaian adalah Rp. 1.831,52 Juta.

SS 2. Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat

Sasaran kegiatan - 2 “Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator dengan jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan periode pengukuran triwulanan. Produksi perikanan tangkap dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dilaporkan secara berkala setiap bulan maupun harian. Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan dengan pencatatan/pengumpulan data oleh petugas Enumerator. Data yang telah didapatkan kemudian diolah, diverifikasi, divalidasi untuk kemudian dilaporkan secara berkala.

Tabel 6. Capaian IKU “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu” Triwulan III Tahun 2025

SS 2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat												
IKU 2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target	Realisasi		%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
893.70	788.43	716.00	704.76	3,570.82	6000	1100	1,176.77	106.98	19.61	-67.04	6000	19.61	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
2,666.70	2,237.00	1,577.78	1,730.94	5,678.50		2200	3,038.88	138.13	50.65	-46,48		50.65	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
4445.9	3672	3147.08	4,388.00	9,369.00		4300	5,948.62	138.34	99.14	-36.51		99.14	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
1,438.00	5,111.00	4,179.15	7,131.00	12278		6000		0.00	0.00			0.00	

Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 4.300 Ton, dengan realisasi yaitu 5.948,62 Ton atau setara dengan 138,34% dari target. Meskipun demikian apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, terjadi penurunan volume produksi secara signifikan, yakni sebesar 36,51%. Jumlah volume produksi perikanan tangkap tertinggi berada pada bulan Mei 2025 sebesar 831,27 Ton sedangkan yang terendah pada bulan Februari yaitu sebesar 267,54 Ton.

Tabel 7. Analisis Rasio Upaya Penangkapan Ikan (*Effort*) dan Armada serta *Catch Per Unit Effort* (CPUE)

Bulan	Jumlah Kapal (Unit)	Jumlah Trip (Upaya/Effort)	Volume Produksi (Kg)	CPUE (Kg/Trip)	Rasio Trip per Kapal
Juli	402	3.458	880.860	254,76	8,60
Agustus	377	3.439	1.040.207	302,46	9,12
September	399	3.955	989.426	250,18	9,91
Total	-	10.852	2.910.493	268,19	-

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 7 menunjukkan bahwa peningkatan volume produksi perikanan tangkap dari triwulan II ke triwulan III disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya puncak musim penangkapan ikan yang ditunjukkan pada hasil penangkapan pada bulan Agustus dengan volume produksi tertinggi sebesar 1.040,20 Ton dengan efisiensi tertinggi (COUE 302,46 Kg/Trip) yang mengindikasikan adanya puncak migrasi di sekitar area penangkapan Palabuhanratu, kemungkinan didukung oleh fenomena *upwelling* yang membawa nutrisi ke permukaan;
2. Periode triwulan III bertepatan dengan musim kemarau dengan kondisi cuaca yang stabil sehingga mendukung kelancaran operasi penangkapan menyebabkan tingginya frekuensi melaut pada periode ini;
3. Adanya dukungan manajemen logistik yang baik, kelancaran proses *handling* dan pendaratan ikan yang tinggi menunjukkan fasilitas Pelabuhan yaitu dermaga bekerja secara optimal untuk menampung volume produksi perikanan.

Dari capaian yang telah didapatkan tersebut, terdapat juga faktor-faktor penghambat dalam mencapai target IKU 2 ini, antara lain:

1. Fasilitas kolam yang sudah dangkal dan terbatas menyebabkan kapal-kapal yang memiliki ukuran >100 GT tidak dapat masuk ke kolam dampak dari dangkalnya kolam dan ruang yang tidak mencukupi kapal untuk bermanuver masuk kedalam;
2. Terbatasnya jumlah petugas enumerator yang tidak sebanding dengan volume aktivitas pendaratan ikan menyebabkan kerap terjadi data loos dalam proses pencatatan hasil tangkapan.

Meskipun realisasi volume produksi PPN Palabuhanratu pada Triwulan III 2025 adalah sebesar 5.948,62 Ton berhasil melampaui target 4.300 Ton, keberhasilan ini perlu dicermati dari aspek efisiensi dan keberlanjutan. Capaian ini didorong oleh tingginya effort nelayan, di mana rata-rata trip per kapal mencapai puncaknya di **September (9,91 trip/kapal)**. Namun, efisiensi penangkapan (CPUE) justru menunjukkan tren menurun dari Agustus (302,46 Kg/Trip) ke September (250,18 Kg/Trip), menandakan effort yang tidak

sebanding dengan hasil. Lebih lanjut, penurunan volume produksi sebesar 36,51% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 merupakan sinyal kuat adanya tekanan pada stok ikan WPPNRI 573, yang memerlukan evaluasi ulang terhadap batas MSY dan peningkatan upaya konservasi.

SS 3. Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing

Sasaran Kegiatan - 3 “Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu, Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu, Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu, Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPN Palabuhanratu, dan Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu

Indikator ini menunjukkan persentase dari seluruh permohonan perusahaan yang telah dianalisis atau dievaluasi dengan jumlah permohonan perusahaan yang diajukan. IKU baru ini dilakukan pengukuran secara tahunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.4 Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu

Indikator kinerja ini merupakan tingkat capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan sesuai keputusan Dirjen Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini dihitung berdasarkan persentase rata – rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu melalui aplikasi PIPP. Perhitungan tersebut didasarkan pada tersediannya data dan informasi mengenai kinerja operasional dan terlaksananya kegiatan – kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang meliputi pengumpulan laporan Inspeksi Pembongkaran Ikan, Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kegiatan K5, dan PNPB yang diinput pada aplikasi PIPP.

Tabel 8. Capaian IKU "Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2025

SS 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing													
IKU 4 Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu													
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
74.6	82.17	85.5	86.25	86.08	84	84	87.91	104.65	104.65	2.13	84	104.65	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
84	83	85.75	87.13	89.42		84	95.00	113.10	113.10	6.24		113.10	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
83.75	85.17	91.25	88.00	90.40		84	98.80	117.62	117.62	9.29		117.62	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
81.1	84.5	87.67	88.58	87.83		84		0.00	0.00			0.00	

Capaian IKU 4 pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 98,80 yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 84, atau setara dengan 117,62% dari target. IKU 4 ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan periode yang sama yaitu sebesar 9,29% yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan maupun pengelolaan data. Peningkatan capaian ini terutama disebabkan oleh meningkatnya frekuensi pengiriman data kelengkapan data penginputan serta ketepatan waktu pada saat penginputan yang menunjukkan meningkatnya kedisiplinan dan efisiensi kerja tim pelaksana. Perbandingan dengan satker lain yaitu PPN Prigi menunjukkan persentase capaian PPN Palabuhanratu tercatat sebesar 101,07% atau 98,80 dari capaian PPN Prigi yaitu sebesar 97,75.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru - penyesuaian Triwulan 4 yang menunjukkan total dari Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). IKU baru ini dilakukan pengukuran secara tahunan. Dalam pencapaian IKU ini didukung oleh 5 (lima) orang SDM, yang terdiri dari 4 orang petugas penerbitan persetujuan berlayar (PB) dan STBLKK

dan 1 (satu) orang petugas penerbitan SHTI.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru yang menunjukkan tingkat pengembangan fasilitas PPN Palabuhanratu dibandingkan dengan masterplan PPN Palabuhanratu. Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. IKU ini dilakukan pengukuran secara tahunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.7 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru yang menunjukkan nilai pengendalian lingkungan yang didasarkan pada aplikasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan. Namun mulai dari Triwulan III Tahun 2024 terdapat pembaruan aplikasi SELARASKAN menjadi SELARASKAN V2 yang mengakibatkan adanya perbedaan pada cara penginputan hasil kerja ke aplikasi SELARASKAN V2.

Tabel 9. Capaian IKU "Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2025

SS 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing												
IKU 7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
-	-	-	-	90.65	30.1	30.1	87.70	291.36	291.36	-3.25	30.1	291.36	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
-	-	-	-	96.86		30.1	88.08	292.62	292.62	-9.06		292.62	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
-	-	-	-	90.49		30.1	88.44	293.82	293.82	-2.27		293.82	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
-	-	-	83.18	87.79		30.1		0.00	0.00	-		0.00	

Dari target capaian Triwulan III yaitu sebesar 30,10, pencapaian indikator nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menunjukkan angka 88,44 atau realisasi capaian sebesar 293,82% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hal tersebut dapat dicapai karena beberapa faktor antara lain kesesuaian data hasil pengelolaan lingkungan yang diinput pada semua indikator program mandatory maupun program voluntary serta ketepatan waktu penginputan pada Web SELARASKAN. Tercapaiannya capaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kesesuaian data hasil pengelolaan lingkungan yang diinput pada seluruh indikator baik dalam program mandatory maupun voluntary;
2. Ketepatan waktu penginputan data melalui platform web SELARASKAN, yang turut berkontribusi terhadap akurasi dan validitas data yang dilaporkan.

Meski demikian terjadi penurunan sebesar 2,27% dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024, hal tersebut dikarenakan adanya pembaruan aplikasi yang menyebabkan terdapat beberapa perubahan pada cara penginputan dari tahun lalu. Nilai terendah pada Triwulan III ini berada pada bulan Juli 2025 yaitu sebesar 83,04. Jika

dibandingkan dengan capaian satuan kerja lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu adalah 93,72% dari realisasi capaian PPN Prigi sebesar 94,37. Nilai terendah pada bulan April ini dikarenakan terdapat beberapa data dukung yang belum sesuai yaitu pada indikator kepatuhan *tenant* dan pengelolaan IPAL. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai SELARASKAN yaitu melakukan evaluasi dengan petugas-petugas yang terlibat secara berkala dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan di PPN Palabuhanratu sehingga dapat diketahui identifikasi permasalahan yang terjadi selama dilaksanakannya pengendalian lingkungan, menjaga konsistensi dan akurasi penginputan data serta meningkatkan pemahaman petugas terhadap pentingnya pelaporan yang tepat waktu.

SS 4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan di PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan - 4 “Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan dan Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan yang berada di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan pelabuhan binaannya. Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

Tabel 10. Capaian IKU " Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan" Triwulan III Tahun 2025

SS 4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan di PPN Palabuhanratu												
IKU 8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2020	2021	2022	2023	2023	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
		-	-	56	195	185	194	104.86	99.49	246.43	195	99.49	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
		-	-	92		190	216	113.68	110.77	134.78		110.77	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
		-	-	162		192	248	129.17	127.18	53.09		127.18	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
		61	50	182.00		195		0.00	0.00	-		0.00	

Pada periode Triwulan III ini IKU 8 memiliki capaian sebesar 248 Kapal dengan target capaian sebesar 192 Kapal yang berarti pada Triwulan III ini telah mencapai target yang ditentukan. Capaian ini meningkat sebanyak 53,09% dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya penambahan pengajuan SKKP dari kapal berukuran 6 GT di PPN Palabuhanratu dan Pelabuhan binaan. Jika dibandingkan dengan satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu sebesar 46,36%, dimana capaian IKU 8 PPN Prigi adalah 535 Kapal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Indikator ini merupakan salah satu ukuran kinerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan. Indikator ini penting dalam rangka memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan awak kapal perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Tingkat pemenuhan dibagi dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :

1. Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;
2. Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;
3. Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;
4. Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”;

Pengukuran dilakukan dengan satuan nilai rata-rata dan bersifat kuantitatif dengan arah polaritas maximizing artinya semakin tinggi nilai yang dicapai maka semakin baik kinerjanya. Pada Tahun 225 ini target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 0,26. Pengukuran indikator ini yaitu semesteran.

SS 5. Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan - 5 “Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu” memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni (1) Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu; (3) Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu; (4) IP ASN PPN Palabuhanratu; (5) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu; (6) Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu; (7) Nilai IKPA PPN Palabuhanratu; (8) Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu; dan (9) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan percepatan pencapaian sasaaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saat ini capaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi salah satu IKU pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Indikator ini dinilai berdasarkan hasil penjumlahan nilai pembangunan ZI menuju WBK pada komponen pengungkit, hasil dan reform yang dihitung secara

tahunan. Nilai diperoleh dari hasil penilaian tim internal KKP. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dalam mempersiapkan penilaian PM pembangunan zona integritas antara lain yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin mengenai pemenuhan kelengkapan dokumen pembangunan zona integritas WBK.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan penyelesaian atas temuan Inspektorat Jenderal II Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan berdasarkan audit yang dilakukan pada tahun 2025.

Tabel 11. Capaian IKU " Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2025

SS 5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu												
IKU 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
-	-	-	-	100.00	85	85	100.00	117.65	117.65	100.00	85	117.65	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
-	-	-	-	100.00		85	100.00	117.65	117.65	100.00		117.65	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
-	-	-	-	80.00		85	100.00	117.65	117.65	125.00		117.65	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
-	-	-	100	100.00		85		0.00	0.00	-		0.00	

Pada Triwulan III ini telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pengelolaan kas bendahara pengeluaran dana bendahara penerimaan per April 2025 pada PPN Palabuhanratu. Hasil dari kegiatan reviu ini menunjukkan bahwa seluruh temuan dan rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti secara menyeluruh atau dinyatakan tuntas. Hal ini mencerminkan kepatuhan dan respon cepat PPN Palabuhanratu terhadap pengawasan internal serta komitmen dalam memperbaiki tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Capaian ini telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100% dari target sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan satker lain yaitu PPN Prigi capaian IKU 11 adalah sama. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III tahun sebelumnya, menunjukkan tidak adanya perubahan dikarenakan capaian bernilai sama. Dengan demikian meskipun tidak ada pertumbuhan dalam capaian, hal ini menegaskan konsistensi dalam mempertahankan standar tinggi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.12 Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu

Indikator ini adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas Implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%), nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP. Indikator ini merupakan indikator baru dengan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.13 IP ASN PPN Palabuhanratu

Indikator ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu :

- Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung

dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus- kursus, dan Seminar/ Workshop/ Magang/ Sejenis;

- Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata- rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Berdasarkan hasil perhitungan keempat dimensi Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tersebut, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
- Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
- Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
- Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung Tidak Profesional); dan
- Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (Sangat Tidak Profesional).

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan anggaran dan program kerja instansi. Untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi serta transparansi dalam pelaksanaannya, penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka menjadi suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Indikator ini mengukur sebesapa besar proporsi nilai pengadaan barang/jasa di PPN Palabuhanratu yang telah diumumkan melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana

Umum Pengadaan) dibandingkan dengan total pagu pengadaan yang tersedia. RUP berfungsi sebagai perencanaan awal kegiatan pengadaan yang wajib diumumkan oleh setiap satuan kerja secara terbuka kepada publik dan pelaku usaha melalui platform SIRUP. Pengumuman RUP pada SIRUP bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang kegiatan pengadaan barang/jasa, yang mendukung pelaksanaan pengadaan secara transparan dan efisien, serta memperkuat pengawasan publik terhadap belanja pemerintah. Semakin tinggi persentase pengumuman RUP di SIRUP, semakin baik kualitas perencanaan pengadaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata Kelola yang baik (good governance) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

IKU ini merupakan iku baru yang baru ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 12. Capaian IKU "Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu" Tahun 2025

SS 5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu												
IKU 14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu (%)												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
-	-	-	-	0	76	76	100	131.58	131.58	-	76	131.58	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
-	-	-	-	-		76	100	131.58	131.58	-		131.58	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
-	-	-	-	-		76	100	131.58	131.58	-		131.58	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
-	-	-	-	-		76		0.00	0.00	-		0.00	

Capaian IKU 14 pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 100% atau realisasi sebesar 131,58% yang berarti telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 76%. Capaian ini diperoleh melalui capaian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)

yang disampaikan melalui nota dinas nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 perihal Penyampaian hasil perhitungan capaian indikator kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025 dari nota dinas tersebut ditunjukkan nilai PPN Palabuhanratu adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan satuan kerja lain yaitu PPN Prigi capaian PPN Palabuhanratu adalah sama yaitu 100%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.15 Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu

Indikator ini menggambarkan sejauh mana PPN Palabuhanratu melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan. Hal ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penetapan status penggunaan, penghapusan aset rusak berat, hingga penyusunan laporan pengelolaan BMN secara periodik. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
3. Tersediannya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.16 Nilai IKPA PPN Palabuhanratu

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen

Perbendaharaan yang terintegrasi pada aplikasi Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja. Dasar hukum penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator antara lain:

- Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif;
- Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian;
- Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin;
- Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani);
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter;
- Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya);
- Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM;
- Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran;
- Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan);
- Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran;
- Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan

perencanaan;

- Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00; dan
- Kesalahan SPM yang diakibatkan kurang telitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Indikator Kinerja Utama 5.17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Palabuhanratu

Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh melalui pengukuran atas:

- e. Variabel efektifitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian Indikator Kinerja Program pada level Unit Eselon I, dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada level K/L; dan
- f. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk membuktikan apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana dan untuk umpan balik perbaikan penganggaran pada periode berikutnya. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian/ Lembaga atas pelaksanaan RKAKL melalui aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMARTDJA telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 yang dicabut oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga. Indikator ini memiliki periode perhitungan tahunan. Aplikasi ini dibangun dengan sistem web-based dan digunakan oleh seluruh kementerian/Lembaga pemerintahan Negara untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru (penyesuaian Triwulan IIIV 2023) dengan perhitungan setiap triwulanan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Tabel 13. Capaian Indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu" Triwulan III Tahun 2025

SS 5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu												
IKU 18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2025	
-	-	-	-	92.16	88.5	88.5	94.36	106.62	106.62	2.39	88.5	106.62	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2025	
-	-	-	-	92.84		88.5	95.01	107.36	107.36	2.34		107.36	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2025	
-	-	-	-	94.5		88.5	95.43	107.83	107.83	0.98		107.83	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2025	
-	-	86.14	92.88	94.72		88.5		0.00	0.00	-		0.00	

Pada Triwulan III tahun 2025 ini terdapat 3 nilai tertinggi yang ada pada unsur pelayanan U1 (Kesesuaian Pelayanan), U2 (Prosedur Pelayanan) dan U3 (Kecepatan Pelayanan) sedangkan untuk nilai terendah ada pada unsur pelayanan U6 (Kompetensi Petugas) dan

U8 (Kualitas Sarana dan Prasarana). Capaian nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mencapai nilai 95,43, yang mana melebihi 107,83% dari target yang ditetapkan yakni 88,5. Nilai tersebut didapat dari 141 responden. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian Triwulan III pada tahun 2025 ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,98%. Perbandingan dengan satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu mencapai 102,76% dari realisasi capaian PPN Prigi yaitu 92,87.

Hal tersebut dapat dicapai dikarenakan oleh kualitas pelayanan di PPN Palabuhanratu yang telah prima dan optimal serta kesadaran dari pengguna jasa sendiri juga untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan sehingga waktu penyelesaian layanan dapat diselesaikan secara efektif dan cenderung cepat.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2024 telah diperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui SP DIPA — 032.03.2.560393/2024 Tanggal 30 November 2023 dengan nilai sebesar Rp. 14.833.174.000,- (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan
- c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Kelima kegiatan tersebut untuk mendukung sasaran strategis yang sudah ditetapkan dan pencapaian target IKU yang sudah ditetapkan. Secara rinci, anggaran tiap kegiatan yang diperoleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan anggaran yang terealisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Tahun 2025

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM EFISIENSI (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH EFISIENSI (Rp.)	REALISASI ANGGARAN(Rp.)	%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	656.261.000	132.307.000	64.838.950	49,01
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	10.052.000	1.605.000	0	00,00
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.176.861.000	11.940.701.000	6.483.832.459	54,30
JUMLAH		Rp. 14.833.174.000,-	Rp. 12.600.440.000,-	Rp.10.518.705.432,-	83,48

Dari tabel 14 dapat dijelaskan bahwa total realisasi anggaran Triwulan III tahun 2025 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar 10.518.705.432,- (sepuluh miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 83,48% dari pagu sebesar Rp. 12.600.440.000 (dua belas miliar enam ratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diimplementasikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada Triwulan III tahun 2025. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Pelabuhan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dapat dilihat dari Dashboard Aplikasi Kinerjaku. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, sebagaimana tercantum dalam dashboard aplikasi Kinerjaku Tahun 2025 yaitu 117,36%.

Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Adapun rincian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu. Indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh tercapainya penerimaan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pemanfaatan lahan, gedung dan bangunan sebesar Rp. 913.977.283,- atau 43,48%;
 - b. Penerimaan jasa tambat 5 – 30 GT sebesar Rp. 201.622.463,- atau 9,58%;
 - c. Penerimaan pelayanan jasa listrik sebesar Rp. 170.482.135,- atau 8,10%.
- 2) Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan pengoptimalan dalam pencatatan data hasil tangkapan;
- 3) Tingkat kinerja PPN Palabuhanratu. Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari kegiatan – kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang dilakukan penginputan setiap harinya kedalam aplikasi PIPP. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena sudah dibentuk tim khusus PIPP di setiap sub koordinator sehingga masing-masing sub koordinator mempunyai tanggung jawab untuk memasukkan datanya sendiri dan tidak hanya bergantung pada satu

atau dua orang petugas PIPP untuk memasukkan data;

- 4) Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan karena dokumen bukti dukung penilaian pada SELARASKAN dapat terpenuhi dan dapat melakukan penginputan data secara tepat waktu;
- 5) Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan. Indikator ini sudah melebihi target yang telah ditentukan sebesar 129,17% hal ini dikarenakan adanya penambahan pengajuan SKKP dari kapal berukuran 6 GT di wilayah PPN Palabuhanratu maupun di Pelabuhan binaan;
- 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil mendapatkan nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan telah menindaklanjuti semua temuan yang ada sehingga realisasi mencapai 100%;
- 7) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu. Indikator ini dapat mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%;
- 8) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang baik sehingga para pengguna jasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja secara optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, upaya – upaya yang perlu dilakukan di masa mendatang yaitu antara lain:

- a) Mempertahankan pelayanan jasa pelabuhan dan potensi PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu untuk meningkatkan realisasi PNBP sebagaimana yang telah ditargetkan;
- b) Monitoring secara lebih fokus kedepannya agar capaian indikator kinerja tersebut dapat meningkat bahkan memenuhi target yang telah ditetapkan;
- c) Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah sebagai berikut :

- Setiap penanggungjawab kegiatan harus konsisten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - Perlu ditingkatkan kepedulian, evaluasi secara sistematis dalam rangka pencapaian indikator kinerja secara berkala.
- d) Mengoptimalkan sarana pelabuhan yang tersedia dan membangun sarana atau fasilitas pelabuhan untuk menunjang operasional, PNBP terutama PNBP Pasca produksi dan pelayanan pelabuhan kepada masyarakat perikanan;
- e) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen mutu bidang-bidang pelayanan pelabuhan, dengan melakukan penerapan ISO 9001:2015 secara terus-menerus guna menjamin mutu pelayanan yang diberikan kepada stakeholder.

4.3 TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI SEBELUMNYA

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan II tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti pada periode Triwulan III tahun 2025 yaitu :

1. Melaksanakan penertiban pas masuk dalam upaya mengurangi loosing dan meningkatkan PNBP;
2. Melakukan revisi halaman III DIPA.

4.4 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Triwulan III tahun 2025, rekomendasi yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi halaman III DIPA;
2. Melaksanakan penguatan koordinasi pelayanan kesyahbandaran serta penyesuaian data kesyahbandaran secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.